KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 989/KPTUN.W7-TUN2/SK.OT1.5/VII/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN PETA BISNIS
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa Peta Bisnis bagian penataan ketatalaksanaan yang merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan efesiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pemberlakuan Peta Bisnis di lingkungan pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 995/SEK/SK/VII/2022 tentang Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBERLAKUAN PETA BISNIS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG UNTUK TAHUN 2026

Kesatu : Menetapkan Pemberlakuan Peta Bisnis di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Peta Bisnis merupakan salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga : Pemberlakuan Peta Bisnis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

PETA ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

PETA BISNIS PROSES
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG



Konteks Organisasi:

- Visi dan Misi PTUN Kupang
- Rencana Strategis PTUN Kupang
- Tugas Pokok dan Fungsi PTUN (UU Peratun)
- Nilai-Nilai dan Budaya Kerja Pengadilan TUN Kupang
- Kebutuhan dan harapan dari Para Pencari Keadilan dan Pihak Pengguna layanan PTUN Kupang lainnya

PELAYANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG DI KUPANG

Perencanaan
- Rencana Strategis
- Rencana Kinerja Tahunan
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Rencana Aksi Kinerja

Pendukung
- Pengelolaan ASN/SDM
- Pengelolaan BMN
- Pengelolaan Dokumen/Arsip
- Pengelolaan Perpustakaan
- Komunikasi

Peningkatan
- Tindakan perbaikan
- Peningkatan berkelanjutan

Kepemimpinan
- Kebijakan dan Arahan Ketua PTUN Kupang
- Penetapan tanggungjawab dan Kewenangan fungsi

Operasi Pelayanan TUN
- Perkara
- Non Perkara

Pemantauan Kinerja
- Audit Internal/Monitoring dan Evaluasi
- Pemantauan Kepuasan Pencari Keadilan dan Masyarakat
- Tinjauan Manajemen
- Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kepuasan Pencari Keadilan dan Pengguna Layanan

Putusan Peradilan TUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.